

**TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN HASIL HUTAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN
“(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 370/PID.SUS/2013/PN.DUM)”**

Erika Kemal Pasa

Abstrak

Hutan Indonesia merupakan karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia, yang merupakan unsur utama sistem penyangga kehidupan manusia. Hutan diartikan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Untuk mencegah terjadinya penebangan pohon secara ilegal Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredaran di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Pengendalian atas peredaran hasil hutan kayu oleh pemerintah dilakukan melalui penerbitan dokumen yang berfungsi sebagai alat legalitas pengangkutan kayu yaitu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Memiliki kayu tanpa SKSHH berdampak merugikan negara salah satunya adalah karena tidak lengkapnya surat-surat yang telah ditetapkan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti penegakan hukum materiil dalam tindak pidana pengangkutan hasil hutan dan aspek keadilan dalam pertimbangan hukum perkara nomor 370/pid.sus/2013/pn.dum. Untuk melakukan penelitian ini penulis menggunakan data kepustakaan yaitu metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan studi kepustakaan dengan sumber hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan serta dianalisa dan diteliti. Selain itu penulis juga menggunakan metode pendekatan yaitu studi kasus putusan nomor 370/pid.sus/2013/pn.dum. Dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Penerapan hukum materiil dalam tindak pidana pengangkutan hasil hutan sudah sesuai dengan rumusan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Melihat unsur-unsur yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti olehnya dan terdakwa patut untuk menerima hukuman sesuai dengan tindakannya dan dengan mempertimbangkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang berhubungan antara satu dengan yang lainnya kemudian diuraikan sesuai dengan unsur-unsur pasal dalam dakwaan maka kebenaran yuridis yang terungkap dipersidangan menjadikan putusan hakim mencerminkan rasa keadilan.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Kehutanan, Perusakan Hutan

**CRIME ON TRANSPORT OF FOREST PRODUCTS BY ACT NUMBER
18 YEAR 2013 ON PREVENTION AND ERADICATION OF FOREST
DESTRUCTION “(CASE STUDY NUMBER: 370/PID.SUS/2013/PN.DUM)”**

Erika Kemal Pasa

Abstract

Indonesian forest is a gift and grace of the One Almighty God, mandated to the nation of Indonesia, which is a key element of human life support systems. A forest is defined as a ecosystem unity in the form of expanse land consist of biological natural resources dominated by trees in their natural environment, in which can not be separated between one and the other. To prevent illegal logging, President Susilo Bambang Yudhoyono through Republic of Indonesia Presidential Decree No. 4 of 2005 on the Eradication of Illegal Logging in Forest Areas and Distribution in the whole territory of the Republic of Indonesia. Control over the distribution of timber forest product by the government is done through the issuance of a document that serves as a legality tool to transport timber in the form of Certificate of Legal Forest Product (SKSHH) issued by the authority. Having timber without SKSHH giving bad impact to the country one of them is due to incomplete paperwork that has been set. Therefore writer interested to examine law inforcement materiil in a criminal offense transport the result of the forest and aspect of justicia in consideration of law case number 370/pid.sus/2013/pn.dum. To do this study author used literature namely the research juridical normative. The research juridical normative is research conducted by the literature with the primary law, secondary, and tersier collected as well as analyzed and studied. In addition to the author also using the approach is a case study ruling number 370/pid.sus/2013/pn.dum. In an effort to make the ruling as well as dropped criminal sanctions, the judge should have consideration juridical and considered a juridical plus judge have to believe if the defendant do the criminal or not as included in the elements a criminal offense which accusation him. Implementation of the law materiil in a criminal offense transport the result of the forest already in accordance with the formulation of the criminal carried out by the defendant. Look at the elements who accusation to thr defendants have proved by him and defendants worthy to accept the punishment in accordance with his actions and to consider the description of the witness, the description of the defendant, and the material evidence related between with each other than outlined in accordance with the element the truth juridical that revealed in the trial makes the judge’s decision reflect the sense of justice

Keywords: Crime, Forestry, Forest Destruction